

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR 'MEWUJUDKAN KONDISI SOSIAL YANG TENTRAM, TERTIB DAN HARMONIS'	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG BARAT	Terwujudnya Masyarakat Yang Tentram, Tertib dan Harmonis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	40 Dokumen	40 Dokumen	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang PNS	21 Orang PNS	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	100 Paket	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
			Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor			Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	31 Unit	18 Unit	Pada dasarnya aset BPBD sebsnysk 31 Unit kendaraan sehingga terinputnya di anggaran RKA sebanyak 31 Unit	diperubahan adanya perubahan atau penghapusan aset sehingga yang di akui oleh bagian aset sebanyak 18 Unit						

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	24 Unit	24 Unit	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota								
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	120 Orang	120 Orang	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	adanya staf atau satgas TRC Badan Penanggulangan Bencana yang berhenti	Lebih Selektif dalam penerimaan staf atau satgas Pada Badan Penanggulangan Bencana	

Kuala Tungkal, tanggal Januari 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. Zulke, M.AP
Nip. 19660528 199103 1 003

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	<p>TATANANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG TERTIB, TENTRAM DAN HARMONIS MENGIKUTI ATURAN DAN NORMA YANG BERLAKU</p> <p>MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA SESUAI PROSEDUR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p> <p>MENGIKUTSERTAKAN SDM BIMBINGAN TEKHNIS DAN PELATIHAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA</p>	<p>PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 8TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI DATA KEBENCANAAN</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 5); JO PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012.PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (BAB.VI KETETNTUAN PERALIHAN PASAL 13 AYAT 2 NOMENKLATUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (BAB.VI KETETNTUAN PERALIHAN PASAL 13 AYAT 2 NOMENKLATUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN DIUBAH MENJADI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</p>	<p>TERWUJUDNYA SUASANA KEHIDUPAN YANG TENTRAM, TERTIB DAN RUKUN ANTAR UMAT BERAGAM , LAPISAN MASYARAKAT DAN KELOMPOK</p> <p>MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERYTA PERLINDUNGAN MASAYRAKAT</p> <p>TERJAGANYA KELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH</p>
	<p>MENGEMBANGKAN SDM BERBASIS KOMPETENSI</p>	<p>PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA KABUPATEN (JITUPASNA)</p>	<p>TERWUJUDNYA DESA SIAGA BENCANA</p>
2	<p>MENGEMBANGKAN SARANA DAN PRASARANA BERBASIS KEBUTUHAN</p> <p>MEMPRIORITASKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH BERESIKO RAWAN BENCANA</p>	<p>PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR</p> <p>PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</p>	<p>MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>MENINGKATNYA PENYELAMATAN, EVAKUASI KORBAN DAN PENANGANAN PENGUNGS AKIBAT BENCANA</p>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
3	PENERBITAN SK BUPATI, TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT KABUPATEN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERENCANA, TERARAH , TERKOORDINASI, TERPADU DAN MENYELURUH SERTA AKUNTABEL	PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA	MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARAN PENDUKUNG TERWUJUDNYA INTERAKSI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA SERTA MENINGKATNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Kuala Tungkal, Januari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



DRS. ZULFIKKI, M.AP
Nip.19660528 199103 1 003